

ANALISIS PENGARUH INFLASI, PENGANGGURAN DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA MANADO*ANALYSIS OF THE EFFECT OF INFLATION, UNEMPLOYMENT AND GOVERNMENT EXPENDITURE ON POVERTY IN MANADO CITY***Oleh:****Rahmat Kasim¹,
Daisy S.M Engka²,
Hanly Dj. Siwu³**¹²³Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

Email:

[¹kasimrahmat13@gmail.com](mailto:kasimrahmat13@gmail.com)[²daisynewengka@gmail.com](mailto:daisynewengka@gmail.com)[³hanlysiwu@gmail.com](mailto:hanlysiwu@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di kota Manado dengan rentang penelitian tahun 2007-2018. Pengujian dilakukan menggunakan metode analisis Regresi Linear Berganda dengan model *double log*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel pengangguran memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel belanja pemerintah memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kemiskinan.

Kata kunci: Inflasi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Kemiskinan

Abstract: This study aims to determinate the effect of inflation, unemployment and government spending on poverty. This research was conducted in the city of Manado with a research span of 2007-2018. The test was performed using multiple linear regression analysis method with double log model. The result showed that the inflation variable had a negative and significant effect on poverty. The unemployment variable has a positive but not significant effect on poverty. The government spending variable has a positive but not significant effect on poverty.

Keyword: Inflation, Unemployment, Government Spending, Poverty

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah lebih dari satu dasawarsa diterapkan di Indonesia tepatnya sejak tanggal 1 Januari 2001, setelah terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui undang-undang ini, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang lebih luas dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Terutama terkait fungsi alokasi, dengan desentralisasi fiskal akan mempermudah proses alokasi sumber daya dari pemerintah daerah kepada masyarakat melalui belanja daerah sehingga dapat membantu program-program prioritas pemerintah terutama pengentasan kemiskinan di daerah.

Menurut Simanjuntak (2002) dalam Parhah (2006) pada dasarnya desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai beberapa sasaran umum, yaitu: 1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara; 2) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah; 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; 4) mengurangi ketimpangan antar daerah; 5) menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah; 6) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan serta diharapkan akan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah karena pemerintah daerah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah mempunyai peluang dan kesempatan lebih besar dalam menanggulangi kemiskinan.

Tabel 1. Perkembangan penduduk miskin, Tingkat Inflasi, pengangguran dan pengeluaran pemerintah Kota Manado

NO	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Inflasi	Pengangguran	Pengeluaran Pemerintah
1	2007	23,000	10,13	40,360	550,089,470,000
2	2008	28,500	9,71	31,046	672,057,075,000
3	2009	27,800	2,31	32,812	665,781,790,000
4	2010	25,100	6,28	26,744	672,057,075,000
5	2011	22,400	0,67	23,361	897,064,922,000
6	2012	20,500	6,04	20,947	881,641,142,000
7	2013	20,500	8,12	16,791	1,000,640,514,000
8	2014	20,370	9,67	17,344	1,000,640,514,000
9	2015	23,960	5,56	27,573	1,478,996,031,000
10	2016	22,410	0,35	22,888	2,012,552,367,000
11	2017	23,390	2,44	18,203	1,682,972,037,000
12	2018	23,210	3,83	20,524	1,805,776,895,000

Sumber: Bps Kota Manado.

Dari data diatas dapat dilihat jumlah orang miskin di kota Manado masih cukup tinggi dan cenderung fluktuatif. Jumlah penduduk miskin terendah ada di tahun 2002 dan 2004 yakni hanya sebesar 17.250 jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin terbanyak ada di tahun 2008 yakni sebesar 28.500 jiwa. Tingkat inflasi yang tinggi juga adalah salah satu pendorong banyaknya orang miskin di Manado. Dari data diatas tingkat inflasi tertinggi ada di tahun 2007 sebesar 10,13 % sedangkan tingkat inflasi terendah ada di tahun 2016 dengan hanya 0,35 %. Pengangguran juga sangat mempengaruhi kemiskinan karena semakin banyak orang menganggur maka berdampak secara personal maupun keluarga dengan menjadi penduduk miskin. Dalam data yang dipaparkan pada tahun 2007 jumlah pengangguran ada di angka tertinggi dengan 40.360 jiwa tercatat sebagai penganggur sedangkan tahun 2013 menjadi tahun dengan jumlah penganggur paling sedikit dengan jumlah 16.791 jiwa. Pemerintah tentu mengambil kebijakan yang nyata dengan mengeluarkan belanja pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum belanja pemerintah meningkat setiap tahun karena dilatarbelakangi dengan kebutuhan masyarakat yang juga meningkat setiap tahun.

Banyak faktor yang membuat banyaknya jumlah penduduk miskin di Kota Manado. Faktor yang paling utama adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia untuk bekerja dalam pekerjaan yang baik diperparah juga dengan sikap kebanyakan masyarakat yang cenderung malas untuk bekerja dan hanya menantikan bantuan

dari sesama bahkan dari pemerintah. Pemerintah juga sudah memberikan kebijakan dalam hal mengurangi jumlah penduduk miskin akan tetapi jika diamati faktor-faktor seperti inilah yang mendorong masih banyaknya penduduk miskin di Kota Manado.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kota Manado. Tingkat Inflasi yang tinggi di suatu daerah sangatlah tidak baik bagi pengentasan kemiskinan karena jika harga barang terus naik maka masyarakat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan primer mereka sehingga mereka berada dalam kemiskinan. Selain itu angka pengangguran yang tinggi juga dapat membuat jumlah orang miskin bertambah. Oleh karena itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yaitu dengan mengeluarkan belanja pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu sesuai dengan penjelasan diatas maka penulis perlu menganalisis lebih jauh faktor-faktor apakah diantara ketiga faktor diatas yang mempengaruhi kemiskinan di kota Manado. Oleh karena itu penelitian ini diberikan judul "Pengaruh Inflasi, pengangguran dan belanja pemerintah terhadap Kemiskinan di kota Manado tahun 2004-2017".

KAJIAN PUSTAKA

Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan menurut Mandala Manurung pengertian Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Menurut Adi Warmankarim secara umum Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas atau jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas.

Dari beberapa pengertian Inflasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara terus menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikannya berbeda.

Pengangguran

Pengangguran dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional yaitu seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Menurut Sukirno (2010), pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.
2. Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran ini terjadi sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar.
3. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi.
4. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia dengan mesin-mesin dan bahan kimia.

Belanja Pemerintah

Pemerintah menggunakan anggaran belanja untuk merencanakan dan mengontrol keadaan fisiknya. Anggaran belanja menunjukkan rencana pengeluaran dan program-program pemerintah dan penghasilan yang diharapkan dari sistem pajak selama tahun yang ditentukan. Anggaran belanja biasanya mengandung daftar program-program spesifik (pendidikan, kesejahteraan, pertahanan, dll) dan juga sumber-sumber pajak (pajak pendapatan, pribadi, pajak asuransi sosial, dll). Anggaran belanja pemerintah memiliki dua fungsi ekonomi utama yaitu sebagai sebuah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatur prioritas nasional, mengalokasikan output nasional di antara konsumsi umum, pribadi dan investasi.

Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang No, 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan

kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Penelitian Terdahulu

Listyaningrum Kusuma Wardani (2013) dengan judul “Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah dan jumlah penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2010”. Hasil penelitian menunjukkan Ada pengaruh dan signifikan antara pengangguran terhadap kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2006-2010. Ada pengaruh dan signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2006-2010. Ada pengaruh yang tidak signifikan antara jumlah penduduk terhadap kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2006-2010. Ada pengaruh secara simultan antara pengangguran, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2006-2010.

Barikah (2015), dengan judul “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di provinsi se Sumatera”. Hasil penelitian menunjukkan Pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera. Hal dapat mengindikasikan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi relative kurang baik, yang antara lain disebabkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi tersebut lebih ditopang oleh sektor konsumsi. Selain itu, kurang maksimalnya aspek pemerataan pendapatan dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan pendapatan cenderung dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat saja. Pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran terbukti mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negative. Sementara itu, variable tingkat pengangguran terbukti berpengaruh secara positif.

Eka Agustina (2018), dengan judul “Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan Dari uji simultan (uji F) dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara parsial jumlah penduduk berpengaruh negative dan signifikan, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan serta tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series*, yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Manado. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara/internet. Data sekunder yang digunakan adalah Inflasi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Kemiskinan di Kota Manado.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan pencatatan dan dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Dokumen yang dimaksud di sini adalah dokumen yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Di Kota Manado.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip dan buku-buku, data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dan arsip BPS Manado.

Definisi Operasional

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara terus menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikannya berbeda.
2. Pengangguran adalah kenaikan harga-harga secara terus menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikannya berbeda.
3. Belanja Pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran atau belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional.
4. Kemiskinan adalah dalam penelitian ini digambarkan menggunakan jumlah penduduk miskin yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan dalam satuan jiwa.

Metode Analisis

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menerangkan besarnya pengaruh Tingkat Inflasi, tingkat pengangguran dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan. Dalam penelitian ini digunakan model regresi double log. Persamaan analisis linier berganda secara umum untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$L_n Y = \beta_0 + L_n \beta_1 X_1 + L_n \beta_2 X_2 + L_n \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Y = Kemiskinan

X1 = Inflasi

X2 = Pengangguran

X3 = Belanja Pemerintah

β_0 = Konstanta merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0 (X1 dan X2 = 0)

ε = Faktor pengganggu di luar model (error)

Uji t statistik

Uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Kriteria pengujian:

Ho: $b_{1,2,3} = 0$, Artinya, variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

Ha: $b_{1,2,3} \neq 0$, Artinya, variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh yang signifikan terhadap variabel Kemiskinan. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka Ho ditolak dan Ha diterima

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka Ho diterima dan Ha ditolak

Uji F statistik

Uji F Statistik digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, Kriteria pengujian:

Ho: $b_{1,2,3} = 0$, Artinya, variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

Ha: $b_{1,2,3} \neq 0$, Artinya, variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh yang signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka Ha ditolak dan Ho diterima

Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka Ha diterima dan Ho ditolak

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu Belanja Pemerintah terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan maka digunakan analisis koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada dasarnya untuk jumlah observasi kurang dari 30 harus dilakukan uji normalitas sedangkan jumlah observasi lebih dari 30 tidak diperlukan uji normalitas karena distribusi sampling error term telah mendekati normal (Ajija, 2011). Selain itu, sampel dalam jumlah kecil yaitu di bawah 100 observasi asumsi kenormalan merupakan peranan yang penting dan untuk sampel dalam jumlah besar asumsi kenormalan dapat diabaikan (Gujarati, 2010).

Uji Multikolinieritas

Pada dasarnya multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro, 2007). Multikolinieritas merupakan hubungan linear antar variabel-variabel bebas dalam persamaan regresi berganda. Gejala multikolinieritas ini dapat dideteksi dari nilai R^2 tinggi tetapi tidak terdapat atau sedikit sekali koefisien dugaan yang berpengaruh nyata dan tanda koefisien regresi tidak sesuai dengan teori (Gujarati, 2004). Deteksi hanya dengan menggunakan nilai R^2 yang tinggi diperlukan kehati-hatian, akan lebih tepat jika mendeteksi dengan melihat perbandingan antara nilai R^2 regresi parsial (auxiliary regression) dan nilai R^2 regresi utama (Widarjono, 2009). Apabila nilai R^2 regresi parsial (auxiliary regression) lebih besar dibandingkan nilai R^2 regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut terjadi multikolinieritas. Multikolinieritas dalam data panel dapat diatasi dengan pemberian pembobotan (cross section weight) atau GLS, sehingga parameter dugaan pada taraf uji tertentu (t-statistik maupun F-hitung) menjadi signifikan.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan/korelasi antar anggota-anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (Gujarati, 2003). Konsekuensi adanya autokorelasi adalah selang keyakinan menjadi lebar serta variasi dan standar error ditaksir terlalu rendah, akibat selanjutnya adalah bahwa pengujian dengan menggunakan uji t dan F tidak lagi sah, jika diterapkan akan memberikan kesimpulan yang menyesatkan secara serius mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir. Pengujian ada atau tidaknya autokorelasi dalam persamaan regresi dilakukan dengan melihat keadaan nilai Durbin Watson (DW test).

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan variabel gangguan mempunyai varian yang tidak konstan dari observasi ke observasi lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji park yang dikembangkan oleh Park pada tahun 1996 yaitu dengan cara menambah satu variabel residual kuadrat. Variabel residual baru akan dihitung dengan melakukan estimasi (regresi). Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka model terkena heteroskedastisitas (Winarno, 2009). Program Eviews memiliki fasilitas cross section weight dan white cross section covariance yang mampu mengatasi masalah heteroskedastisitas (Gujarati, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda Pengaruh Inflasi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan

Variable	Coefficient
Constant	4.652637
Inflasi	-0.092692
Pengangguran	0.189645
Belanja Pemerintah	-0.088930

Sumber: Regresi Menggunakan Eviews 8

Dari hasil analisis diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 I + \beta_2 PE + \beta_3 BP + \epsilon \quad Y = 4,652467 - 0,092692 + 0,189645 - 0,888930$$

Setelah mendapatkan model persamaan regresi diatas, maka implementasi hasil regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (β) positif. Oleh karena itu apabila Inflasi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah nilainya 0 maka, angka kemiskinan akan naik.
2. Jika Tingkat Inflasi naik sebesar 1 % maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,09 %.
3. Jika Pengangguran naik 1 % maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebesar 0,18 %.
4. Jika Belanja Pemerintah naik 1 % maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar **0,88 %**.

Uji t-statistik

Uji statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Hasil pengujian tersebut dapat menentukan apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima.

Tabel 3. Uji t-Statistik

Variable	t-Statistic	Prob.
Constant	3.790038	0.0091
Inflasi	-2.620907	0.0395
Pengangguran	1.820775	0.1185
Belanja Pemerintah	-1.201070	0.2750

Sumber: Regresi Menggunakan Eviews 8

Dari tabel diatas kita dapat melihat membandingkan hasil t statistik sebagai berikut:

1. Variabel Tingkat Inflasi terhadap Kemiskinan
t hitung sebesar -2,6209. Nilai t tabel sebesar 2,228. Jika dilihat artinya $-2,6209 < 2,228$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$. Hal ini berarti variabel Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.
2. Variabel Pengangguran terhadap Kemiskinan
nilai t hitung sebesar 1,8207. Nilai t tabel sebesar 2,228. Jika dilihat artinya $1,8207 < 2,228$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$. Hal ini berarti variabel Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.
3. Variabel Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan
nilai t hitung sebesar -1,2010. Nilai t tabel sebesar 2,228. Jika dilihat artinya $-1,2010 < 2,228$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$. Hal ini berarti variabel Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Uji F-statistik

Uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Tabel 4. Uji F-Statistik

F-Statistic	Prob.
7.094352	0.021254

Sumber: Regresi Menggunakan Eviews 8

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa diperoleh perhitngan Fhitung sebesar 7,0943 dan Ftabel sebesar 6,55 dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 . Apabila dibandingkan dengan Fhitung dengan nilai Ftabel, yaitu $7,0943 > 6,55$. Hasil pengujian dapat dilihat juga dari signifikansi sebesar 0,021 lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$ hal ini menunjukkan model regresi yang fit.

Uji R²

Koefisien determinasi (Adjusted R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah dari nol sampai satu. Nilai Adjusted R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 5. Uji R²

R²
0.780083

Sumber: Regresi Menggunakan Eviews 8

Berdasarkan hasil hitungan dengan alat analisis, menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R² adalah 0,780. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Tingkat Inflasi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah menerangkan variabel dependen yaitu Kemiskinan sebesar 78 % sedangkan sisanya sebesar 22 % diterangkan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Pada dasarnya untuk jumlah observasi kurang dari 30 harus dilakukan uji normalitas sedangkan jumlah observasi lebih dari 30 tidak diperlukan uji normalitas karena distribusi sampling error term telah mendekati normal (Ajija, 2011). Selain itu, sampel dalam jumlah kecil yaitu di bawah 100 observasi asumsi kenormalan merupakan peranan yang penting dan untuk sampel dalam jumlah besar asumsi kenormalan dapat diabaikan (Gujarati, 2010).

Tabel 6. Uji Normalitas

Jarque-Bera	Prob.
0.026957	0.986612

Sumber: Regresi Menggunakan Eviews 8

Dari data yang digunakan untuk mengetahui normalitas suatu data maka digunakan tes Jarque Bera. pengujian normalitas data residual memiliki nilai uji statistik Jarque Bera sebesar 0,026 dengan signifikansi (p) sebesar 0,986. Oleh karena $p > 0,05$ maka disimpulkan bahwa data dalam penelitian normal. Dengan demikian diketahui bahwa data penelitian memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Pada dasarnya multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro, 2007).

Tabel 7. Uji Multikolinieritas

	INFLASI	PENGANGGURAN	BELANJA PEMERINTAH
INFLASI	1.000000	-0.224246	-0.244997
PENGANGGURAN	-0.224246	1.000000	-0.511857
BELANJA PEMERINTAH	-0.244997	-0.511857	1.000000

Sumber: Regresi Menggunakan Eviews 8

Dari data uji Multikolinieritas data diatas dapat dilihat bahwa setiap variabel penelitian memiliki angka korelasi kurang dari 0,08. Artinya dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen bebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini keberadaan autokorelasi dapat di uji dengan uji Durbin Watson.

Lewat Pengujian yang dilakukan didapat dengan jumlah Sampel 10 dan memiliki 3 variabel bebas, tabel Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai $d_L = 0,71$ dan nilai $d_U = 1.61$. Nilai DW sebesar 2,53 lebih besar dari nilai $d_L = 1,34$ dan lebih besar dari nilai $d_U = 1.59$ yang artinya terdapat autokorelasi dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.

Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Prob.
Inflasi	0.0395
Pengangguran	0.1185
Belanja Pemerintah	0.2750

Sumber: Regresi Menggunakan Eviews 8

Menurut hasil uji heteroskedastisitas seluruh variabel independen mempunyai signifikansi $> 0,05$. Dimana sig Tingkat Inflasi sebesar 0,5306, sig Pengangguran sebesar 0,655, dan sig Belanja Pemerintah sebesar 0,5121. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari heterokedastisitas.

Pembahasan

Berdasarkan Hasil regresi sederhana yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini saling mempengaruhi. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai faktor yang seringkali mempengaruhi keadaan di masyarakat. Dari hasil pengujian yang dilakukan maka dapat ditemukan fakta-fakta yang tidak seperti teori yang ada. Saling keterkaitan variabel-variabel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Variabel Tingkat Inflasi berpengaruh Negatif terhadap Kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi jumlah kemiskinan yaitu sebesar $-0,09$. Jika Tingkat Inflasi meningkat sebesar 1 % maka Jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,09 %. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal peneliti serta tidak sesuai dengan teori bahwa inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan ini menimbulkan daya beli masyarakat yang menurun yang berujung pada peningkatan

kemiskinan. Sekalipun penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang ada tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian *Barikah (2013)*, yang menjelaskan Pertumbuhan ekonomi (X1) dan inflasi (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera. Hal dapat mengindikasikan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi relative kurang baik, yang antara lain disebabkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi tersebut lebih ditopang oleh sektor konsumsi. Selain itu, kurang maksimalnya aspek pemerataan pendapatan dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan pendapatan cenderung dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat saja.

2. Variabel Pengangguran berpengaruh Positif terhadap Kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi jumlah Kemiskinan yaitu sebesar 0,18. Jika Pengangguran meningkat sebesar 1 % maka Kemiskinan akan turun sebesar 0,18 % . Hal ini sesuai dengan teori bahwa pengangguran dapat menyebabkan ketidakmerataan perolehan pendapatan. Hukum Okun menyatakan bahwa dalam peningkatan pengangguran dapat menurunkan pendapatan. Pada saat menganggur seseorang tidak memiliki pendapatan sehingga akan menurunkan jumlah konsumsi dan akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian membuat masyarakat yang menganggur masuk dalam kategori miskin. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh *Eka Agustina* Secara parsial tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.
3. Variabel Belanja Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi jumlah kemiskinan yaitu sebesar -0,88. Jika Belanja Pemerintah meningkat sebesar 1 % maka Kemiskinan akan turun sebesar 0,88 % . Hasil ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Hasil penelitian sesuai dengan teori yang ada bahwa penyediaan berbagai macam barang dan jasa konsumsi publik yang dibiayai oleh pajak bagi kelompok penduduk yang paling miskin, merupakan instrument lain yang cukup berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian *Listyaningrum Kusuma Wardani (2013)* dimana Ada pengaruh dan signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2006-2010.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan Sebagai berikut:

1. Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Kota Manado.
2. Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertambahan jumlah penduduk miskin di Kota Manado.
3. Belanja Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertambahan jumlah penduduk miskin di Kota Manado.
4. Secara bersama-sama atau simultan maka Tingkat Inflasi, pengangguran, dan Belanja Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Manado dimana hasil pengujian menunjukkan pengaruh ketiga variabel ini diatas 50%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan Sebagai berikut:

1. Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Kota Manado.
2. Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertambahan jumlah penduduk miskin di Kota Manado.
3. Belanja Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertambahan jumlah penduduk miskin di Kota Manado.
4. Secara bersama-sama atau simultan maka Tingkat Inflasi, pengangguran, dan Belanja Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Manado dimana hasil pengujian menunjukkan pengaruh ketiga variabel ini diatas 50%.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonesia
- Ajija, Shochrul R, dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.

Badan Pusat Statistika 2019 <https://manadokota.bps.go.id/>

- Barika, Barika (2015) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Se Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, pp. 27-36. ISSN 1979-7338. <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/11025> 5
- Eka Agustina (2018) “Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 4 Nomor 2, September 2018, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/13022>
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS* Edisi IV. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Gujarati, Damodar. N. 2003. *Basic Econometric Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies Inc
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Listyaningrum Kusuma Wardani (2013) “Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah dan jumlah penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2010” 30 Oktober 2013 <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/18211>
- Nanga, Muana. 2001. *Makro ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan* Edisi Perdana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadono, Sukirno. 2010. *Makro ekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.